

## Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Debat Capres dan Cawapres 2024 Relevansinya sebagai Sumber Bahan Ajar

Uswatun Khasanah<sup>1\*)</sup>  
Ribut Wahyu Eriyanti<sup>2)</sup>  
Daroe Iswatiningsih<sup>3)</sup>  
Mardiana Wardani<sup>4)</sup>  
Umi Puji Rahayu<sup>5)</sup>

Universitas Muhammadiyah Malang<sup>1.2.3.4.5</sup>

\*) Penulis Korespondensi: Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Posel: hasanahuus411@gmail.com<sup>1</sup>, ributeriyanti@umm.ac.id<sup>2</sup>, iswatiningsihdaroe@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa pada debat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Selain itu, penelitian ini juga menggali relevansi debat sebagai sumber bahan ajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti memanfaatkan teori Geoffrey Leech yang berisikan enam maksim dasar kesantunan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe *instrumental single case study*. Sumber data penelitian ini adalah keseluruhan lima kali sesi debat Capres-Cawapres 2024. Tahapan analisis yang dipergunakan adalah menyusun tabulasi data berdasarkan dimensi dan subdimensi pelanggaran kesantunan, memasukkan hasil data transkrip ke dalam tabulasi, menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan pemilahan maksim, serta melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua jenis pelanggaran maksim dapat ditemukan dalam lima kali perhelatan debat Capres dan Cawapres 2024, di mana bentuk utama pelanggaran adalah maksim pujian (53,2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi untuk menjadikan tayangan debat Capres-Cawapres sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya menyangkut pengayaan kosakata, pemahaman topik-topik kontekstual, penekanan debat melalui data dan urgensi memegang nilai-nilai universal sebagai kesepakatan atau pegangan dalam berdebat. Penelitian ini merekomendasikan muatan nilai-nilai kesantunan dalam bahan ajar Bahasa Indonesia di sekolah menengah.

**Kata Kunci:** Kesantunan Berbahasa; Debat Capres-Cawapres 2024; Pelajaran Bahasa Indonesia.

### *The Deviation of Linguistic Politeness in the 2024 Presidential and Vice-Presidential Debate the Relevance as a Source of Learning Materials*

**Abstract:** This study aims to describe the forms of deviations of language politeness in the presidential and vice presidential debates in the 2024 presidential elections. In addition, this research also explores the relevance of debates as a source of teaching materials in Indonesian language learning. The researcher utilized Geoffrey Leech's theory which contains six basic maxims of politeness. This research used qualitative method with instrumental type single case study. The data source of this research was the entire five sessions of the 2024 presidential and vice presidential debates. The stages of analysis used were tabulating data based on the dimensions and subdimensions of politeness violations, entering the results of transcript data into tabulations, presenting data in tabular form based on maxim sorting, and interpreting and drawing conclusions. The results showed that all types of maxims violations could be found in the five presidential and vice presidential debate events of 2024, where the main form of violation was the maxim of praise (53.2%). The results show that there is relevance to making the presidential and vice presidential debate broadcasts as Indonesian language learning media, especially regarding vocabulary enrichment, understanding contextual topics, emphasizing debate through data and the urgency of holding universal values as an agreement or handle in debating. This study recommends the content of politeness values in Indonesian language teaching materials in secondary schools.

**Keywords:** Language Politeness; 2024 Presidential and Vice Presidential Debates; Indonesian Language Lessons.

**Proses artikel:** Dikirim: 29-11-2024; Direvisi: 30-12-2024; Diterima: 30-12-2024; Diterbitkan: 31-12-2024

**Gaya sitasi (MLA edisi ke-7):** Khasanah, Uswatun, et al. "Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Debat Capres dan Cawapres 2024 Relevansinya sebagai Sumber Bahan Ajar." *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8.2 (2024): 256-265. Print/Online. **Pemegang Hak Cipta:** Uswatun Khasanah, Ribut Wahyu Eriyanti, Daroe Iswatiningsih, Mardiana Wardani, Umi Puji Rahayu. **Publikasi Utama:** Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2024).



Proses ini berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.

## Pendahuluan

Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia baru saja menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) periode 2024-2029. Salah satu momen Pemilu yang menarik perhatian publik adalah debat antar Capres dan Cawapres. Lembaga Survei Indonesia (LSI) (2023) menyebut 72,5% masyarakat Indonesia tertarik untuk menonton debat resmi yang diselenggarakan KPU tersebut (Katadata.com, 2023). Data ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap debat politik.

Perdebatan yang santun dan berbobot sangat berguna bagi pendidikan. Hal ini semakin penting jika dilihat dari diskusi publik yang sering kali tidak santun dan tanpa fakta seperti yang banyak berlangsung di media sosial (Hameleers, 2022). Secara khusus, tayangan debat politik Capres-Cawapres juga bisa menjadi bahan media pembelajaran visual bagaimana cara debat yang baik dalam pendidikan bahasa Indonesia. Mengetahui cara berdebat yang baik adalah kegiatan yang harus dilatih, namun hanya sebagian kecil siswa di sekolah menengah yang memiliki kemampuan tersebut (Litan et al., 2023). Dalam konteks pendidikan, momen debat politik Pemilu bisa menjadi gambaran ideal bagaimana sebuah contoh calon pemimpin memegang prinsip kesantunan dan menyampaikan fakta, menyampaikan pendapat, serta metode mengajukan kritik atau pertanyaan terhadap rivalnya. Harapannya, banyak hal yang bisa dipelajari dari debat politik calon Capres-Cawapres bagi siswa maupun sebagai bahan pembelajaran di kelas tentang cara berdebat yang benar dan baik.

Permasalahannya kemudian, debat politik sangat rentan mengalami pelanggaran kesantunan (Arum et al., 2020; Septiana, 2023). Di sinilah tantangannya berlangsung. Leech (2013) menjelaskan bahwa kesantunan merupakan bentuk perilaku dalam upaya membangun kerja sama sosial. Untuk mempertahankan kesantunan demi terwujudnya kerja sama, maka Leech mengusulkan apa yang dia sebut "Prinsip Kesantunan" sebagai sarana untuk menjelaskan bagaimana kesantunan harus diperhatikan dalam sebuah perbincangan, yang menunjukkan kemampuan orang yang sedang terlibat dalam interaksi sosial untuk saling menjaga suasana yang relatif harmonis. Dengan begitu, tujuan utama dari Prinsip kesantunan (*Politeness Principle*) menurut Leech adalah untuk membangun dan mempertahankan perasaan senasib sepenanggungan di dalam kelompok sosial (Leech, 2015).

Leech (2014) selanjutnya menyebutkan enam maksim, yang semuanya terkait dengan gagasan *cost-benefit scale* (pertimbangan keuntungan dan kerugian sebagai dasar kesantunan). Maksim-maksim tersebut adalah maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), kedermawanan (*generosity maxim*), maksim pujian (*approbation maxim*), kerendahan hati (*modesty maxim*), maksim kesepakatan (*agreement maxim*), dan maksim simpati (*sympathy maxim*). Maksim kebijaksanaan berkaitan dengan usaha meminimalkan kerugian sekecil mungkin dan memaksimalkan keuntungan atau manfaat bagi pendengar. Maksim kedermawanan atau kemurahan hati secara langsung terkait, atau menjadi konsekuensi, dari maksim kebijaksanaan. Maksim kemurahan hati menyarankan orang untuk meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pendengar. Maksim pujian berarti meminimalkan cacian dan memaksimalkan pujian bagi pendengar. Selaras dengan semangat yang terkandung dalam maksim pujian, maka maksim kerendahan hati menyangkut upaya meminimalkan pujian bagi diri sendiri dan memaksimalkan cercaan bagi diri sendiri. Maksim berikutnya adalah maksim kesepakatan atau persetujuan, yakni tentang bagaimana meminimalisir ketidaksepakatan antara penutur dan mitra tutur. Maksim simpati mengingatkan agar seseorang meminimalkan antipati dan memaksimalkan simpati terhadap orang lain.

Dalam interaksi hubungan sosial, setiap orang memiliki kesadaran bahwa terdapat norma-norma berperilaku secara sosial. Jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari norma berperilaku tersebut, maka dianggap anti-sosial atau melanggar norma (Wales, 2014). Leech menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi apa yang disebut pelanggaran atau penyimpangan (*deviation*) adalah

menetapkan terlebih dahulu karakteristik dari norma pragmatik itu sendiri. Ketika maksim-maksim yang ditetapkan ini tidak dipatuhi, maka terjadi pelanggaran atau penyimpangan (Leech, 2013). Berkaitan dengan uraian tersebut, maka pelanggaran kesopanan berbahasa artinya adalah dalam sebuah proses komunikasi terjadi penyimpangan karena melanggar prinsip-prinsip norma sosial kerjasama (Leech, 2015). Penelitian ini secara garis besar memanfaatkan maksim-maksim kesantunan dari Leech. Maka, ketika terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, dapat dikatakan terjadi pelanggaran kesantunan.

Penelitian tentang aspek kesantunan berbahasa dalam debat memang bukan kajian baru, sebagian besar peneliti telah memanfaatkan analisis Leech untuk memberikan penilaian terhadap jalannya debat (Hamza & Nordin, 2023; Kusworo et al., 2022), sebagian peneliti menggunakan kerangka dari tokoh lain yang serumpun dalam kajian pragmatik seperti Brown-Levinson (Batubara et al., 2022; Sihite et al., 2021). Ada pula yang menggunakan kerangka Leech dan Brown-Levinson secara bersamaan sebagai pisau analisis (Doohee, 2023; Fahad & Mayuuf, 2022; Pangestika et al., 2018). Keseluruhan penelitian tersebut secara umum memiliki pola yang sama, yakni menerapkan teori kesantunan untuk menguji proses jalannya perdebatan, namun kurang memberikan interpretasi yang melampaui teori yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian ini memanfaatkan salah satu teori kesantunan, khususnya dari Leech, selanjutnya bergerak untuk bisa mengambil poin-poin penting dalam jalannya debat untuk menemukan nilai-nilai universal lain terhadap kesantunan berdebat, khususnya disesuaikan sebagai bagian muatan Pelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran pragmatik terkait kesantunan berbahasa para kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam momen debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bentuk-bentuk pelanggaran Debat Capres-Cawapres ini penting diidentifikasi lebih lanjut untuk menemukan prinsip-prinsip kesantunan apa saja yang seharusnya menjadi pegangan dalam debat publik. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia tentang bentuk-bentuk pelanggaran berbahasa yang harus dihindari dalam aktivitas berdebat. Dengan demikian, *output* dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi seputar materi prinsip-prinsip penting norma kesantunan dalam pelajaran bahasa Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, lebih spesifik lagi *instrumental single case study*. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelanggaran kesantunan berbahasa sebagai materi yang terintegrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sub fokus penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan teori Leech, serta menemukan relevansi temuan dengan pelajaran bahasa Indonesia.

Sumber data penelitian ini adalah keseluruhan lima kali sesi debat Capres-Cawapres 2024. Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan video yang dimuat dalam situs resmi akun Youtube KPU (KPU RI). Peneliti memanfaatkan triangulasi data Untuk memastikan keabsahan data dari berita-berita *online* yang menyediakan transkrip atau rangkuman debat seperti yang disediakan oleh berita portal dari Tirto yang menyediakan transkrip debat.

Tabel 1 Sumber Data Penelitian

Sesi	Tanggal	Tema	Link Utama
1	12 Desember 2023 (Capres)	Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yNO0YS846kU&amp;t=1725s">https://www.youtube.com/watch?v=yNO0YS846kU&amp;t=1725s</a>
2	22 Desember 2023	Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=L0nttMwjJBA">https://www.youtube.com/watch?v=L0nttMwjJBA</a>
3	7 Januari 2024 (Capres)	Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KJdt-HBBGIo">https://www.youtube.com/watch?v=KJdt-HBBGIo</a>
4	21 Januari 2024 (Cawapres)	Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=anuQxiXpQ7I">https://www.youtube.com/watch?v=anuQxiXpQ7I</a>
5	4 Februari 2024	Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), Ketenagakerjaan.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8JG6JxvmEzo">https://www.youtube.com/watch?v=8JG6JxvmEzo</a>

Instrumen penelitian ini menggunakan bentuk pelanggaran maksim dari Leech sebagai berikut:

Tabel 2 Instrumen Penelitian

Maksim	Pengukuran	Contoh Ungkapan	Kode
<b>Pelanggaran <i>Tact Maxim</i> (Maksim Kebijaksanaan)</b>	Memperbesar kerugian bagi mitra tutur demi memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri	Memerintahkan, menuntut	P.MK1
<b>Pelanggaran <i>Generosity Maxim</i> (Kedermawanan)</b>	Memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan meminimalkan keuntungan bagi mitra tutur	Menolak, Mengancam	P.MK2
<b>Pelanggaran <i>Approbation Maxim</i> (Maksim Pujian)</b>	Melakukan usaha cacian kepada mitra tutur agar memaksimalkan pujian bagi diri sendiri	Menghina, mengeluh, mengadu	P.MP
<b>Pelanggaran <i>Modesty Maxim</i> (Kerendahan Hati)</b>	Memuji diri sendiri dengan berlebihan dan menjatuhkan mitra tutur dengan cercaan	Menyombongkan diri, menjadi berpuas diri	P.KH
<b>Pelanggaran <i>Agreement Maxim</i> (Maksim Kesepakatan)</b>	Mencari-cari ketidaksepakatan antara penutur dan mitra tutur	Tidak setuju, bertentangan	P.MK3
<b>Pelanggaran <i>Sympathy Maxim</i> (Maksim Simpati)</b>	Menunjukkan sikap antipati dan tidak menunjukkan rasa simpati	Mengekspresikan antipati terhadap mitra tutur	P.MS

Sumber: Diolah peneliti dari Leech (2013, 2014, 2015)

Menurut Santosa (2014) teknik analisis kebahasaan yang sesuai dan sering digunakan untuk kajian pragmatik seperti analisis maksim adalah analisis data taksonomi Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan data berlangsungnya debat dan kemudian melakukan transkrip.
2. Membuat tabulasi data berdasarkan dimensi dan subdimensi pelanggaran kesantunan telah ditentukan sebelumnya.
3. Memasukkan hasil data transkrip ke dalam tabulasi.
4. Menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan pemilahan maksim.
5. Melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan dari penyajian data tersebut.

## Hasil dan Diskusi

### Hasil

#### 1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Pada Debat Capres-Cawapres 2024

Subbab temuan disajikan berdasarkan runtutan sesi debat pertama hingga terakhir. Hal ini agar bisa memberikan deskripsi yang lebih luas untuk bentuk pelanggaran pada setiap sesi debat yang berlangsung. Pada bagian akhir, peneliti menyajikan gambaran keseluruhan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan dalam semua sesi debat.

Debat pertama menunjukkan bahwa sepanjang berlangsungnya debat, lima dari enam bentuk pelanggaran maksim Leech terjadi. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi kandidat yang melakukan lima bentuk pelanggaran, sementara Prabowo Subianto melakukan tiga bentuk pelanggaran. Secara kumulatif, total ungkapan yang mengandung pelanggaran kesantunan berjumlah 21 kali, di mana Anies dan Prabowo sama-sama melakukan 8 kali pelanggaran, kemudian Ganjar melakukan 5 kali ungkapan pelanggaran (Tabel 3).

Tabel 3 Pelanggaran Kesantunan Debat Pertama (Capres)

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan						Total
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3	P.MS	
1	Anies	0	1	3	1	1	2	8
2	Prabowo	0	1	4	3	-	-	8
3	Ganjar	0	1	1	1	1	1	5
	Total	0	3	8	5	2	3	21

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa dibanding debat pertama presiden, debat wakil presiden (debat kedua) tidak terlalu banyak serangan-serangan terhadap lawan bicara. Sepanjang

berlangsungnya debat, empat dari enam bentuk pelanggaran maksim Leech terjadi. Muhaimin dan Gibran menjadi kandidat yang melakukan tiga bentuk pelanggaran, sementara Mahfud melakukan 2 bentuk pelanggaran. Secara kumulatif, total ungkapan yang mengandung pelanggaran kesantunan berjumlah 9 kali, di mana Muhaimin paling banyak sebesar 4 kali, kemudian Gibran 3 kali, dan terakhir Mahfud 2 kali (Tabel 4).

Tabel 4 Pelanggaran Kesantunan Debat Kedua (Cawapres)

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan					Total	
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3		P.MS
1	Muhaimin	-	1	1	-	2	-	4
2	Gibran	-	1	1	-	1	-	3
3	Mahfud	-	-	-	1	1	-	2
Total		0	-	2	2	1	4	9

Debat ketiga menunjukkan dua dari enam bentuk pelanggaran maksim Leech terjadi. Ketiganya melakukan jenis pelanggaran yang sama, yakni Maksim Pujian dan Maksim Kesepakatan. Secara kumulatif, total ungkapan yang mengandung pelanggaran kesantunan berjumlah 20 kali, di mana Anies tercatat paling banyak mengeluarkan ungkapan yang memuat pelanggaran kesantunan (10 kali), disusul oleh Prabowo (6) dan Ganjar (4) (Tabel 5).

Tabel 5 Pelanggaran Kesantunan Debat Ketiga (Capres)

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan					Total	
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3		P.MS
1	Anies	-	-	9	-	2	-	11
2	Prabowo	-	-	4	-	2	-	6
3	Ganjar	-	-	4	-	-	-	4
Total		-	-	16	-	4	-	20

Debat keempat mempertemukan tiga kandidat wakil presiden dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa”. Debat berlangsung tanggal 21 Januari 2024. Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa terjadi lima dari enam bentuk pelanggaran maksim Leech. Berdasarkan jumlah ungkapan, Gibran menjadi penutur dengan pelanggaran kesantunan terbanyak (9 kali), kemudian disusul oleh Muhaimin (7 kali), dan paling sedikit adalah Mahfud MD (4 kali) (Tabel 6).

Tabel 6 Pelanggaran Kesantunan Debat Keempat (Cawapres)

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan					Total	
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3		P.MS
1	Muhaimin	-	-	4	-	3	-	7
2	Gibran	1	1	7	-	-	-	9
3	Mahfud	-	1	1	2	-	-	4
Total		1	2	12	2	3	-	20

Debat kelima merupakan debat pamungkas yang mempertemukan kali ketiga kandidat presiden. Debat berlangsung tanggal 04 Februari 2024. Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa debat terakhir ini adalah debat paling yang paling minim mengandung ungkapan yang memuat pelanggaran kesantunan. Terjadi enam kali ungkapan yang memuat pelanggaran maksim dalam empat bentuk dari enam bentuk pelanggaran maksim Leech. Kali ini bukan Anies Baswedan yang menjadi penutur dengan

jumlah pelanggaran tertinggi, namun Ganjar dengan tiga bentuk pelanggaran dan empat ungkapan. Sementara Anies dan Prabowo masing-masing hanya melakukan 1 kali pelanggaran (Tabel 7).

Tabel 7 Pelanggaran Kesantunan Debat Kelima (Capres)

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan						Total
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3	P.MS	
1	Anies	-	-	-	-	1	-	1
2	Prabowo	-	-	-	-	-	1	1
3	Ganjar	-	-	2	1	-	-	4
Total		-	-	2	1	2	1	6

Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa Anies Baswedan menjadi penutur dengan total ungkapan yang mengandung pelanggaran kesantunan terbanyak sebesar 20 kali atau setara dengan (26%). Posisi kedua adalah Prabowo Subianto sebanyak 15 kali ungkapan yang setara dengan 19,5%. Posisi ketiga disusul oleh Ganjar sebesar 16,9%. Jika diakumulasikan, pelanggaran kesantunan dalam debat presiden yang berlangsung tiga sebanyak 62,4%. Penutur yang banyak melakukan pelanggaran kesantunan di posisi keempat adalah Gibran dengan total 12 pelanggaran (15,6%), yang disusul tipis dengan angka pelanggaran Muhaimin di posisi berikutnya sebanyak 11 kali (14,3%), dan terakhir Mahfud MD sebanyak 6 kali atau setara dengan 7,8% (Tabel 8).

Berdasarkan akumulasi dari proses lima kali debat, secara umum enam bentuk pelanggaran maksim terjadi. Pelanggaran maksim paling tinggi adalah dalam bentuk *Approbation Maxim* (Maksim Pujian) dengan jumlah 41 kali. Angka ini berarti setara dengan 53,2% dari keseluruhan ungkapan pelanggaran yang berlangsung selama debat Capres dan Cawapres berlangsung. Ungkapan yang mengandung pelanggaran maksim berikutnya adalah dalam bentuk *Agreement Maxim* (Maksim Kesepakatan) dengan jumlah 15 atau setara dengan 19,5% dari keseluruhan ungkapan yang mengandung pelanggaran. Bentuk pelanggaran ketiga adalah *Modesty Maxim* (Kerendahan Hati) sebanyak 9 ungkapan atau setara dengan (11,7%). Tiga bentuk pelanggaran lainnya tidak sampai 10%, seperti Pelanggaran *Generosity Maxim* (Kedermawanan) sebanyak 7 kali, *Sympathy Maxim* (Maksim Simpati) sebanyak 4 kali, dan Pelanggaran *Tact Maxim* (Maksim Kebijaksanaan) sebanyak 1 kali (Tabel 4.7).

Tabel 8 Total Pelanggaran Kesantunan dalam Lima Debat Capres dan Cawapres

No	Penutur	Ungkapan yang Memuat Pelanggaran Kesantunan						Total	%
		P.MK1	P.MK2	P.MP	P.KH	P.MK3	P.MS		
1	Anies Baswedan	0	1	12	1	4	2	20	26
2	Prabowo Subianto	0	1	8	3	3	0	15	19,5
3	Ganjar Pranowo	0	1	7	2	1	2	13	16,9
4	Muhaimin	0	1	5	0	5	0	11	14,3
5	Gibran	1	2	8	0	1	0	12	15,6
6	Mahfud MD	0	1	1	3	1	0	6	7,8
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>100</b>
<b>Persentase</b>		<b>1,3</b>	<b>9,1</b>	<b>53,2</b>	<b>11,7</b>	<b>19,5</b>	<b>5,2</b>	<b>100</b>	

## 2. Relevansi Debat Capres dan Cawapres sebagai Sumber Bahan Ajar pada Pembelajaran Bahasa Indonesia

Terdapat empat elemen yang terkandung dalam capaian Pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024, yakni menyimak, membaca dan memirsa, Berbicara dan Mempresentasikan, dan menulis. Selain memuat aspek-aspek umum seperti berpikir kritis, elemen berbicara dan mempresentasikan memuat tuntutan

agar “peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi”. Kajian pelanggaran kesopanan selanjutnya turut berkontribusi untuk meletakkan materi pembelajaran mengenai bagaimana mengimplementasikan norma kesopanan dalam berbahasa.

Ada sejumlah catatan penting dari debat Capres dan Cawapres yang relevan terkait fungsinya sebagai media pembelajaran debat Bahasa Indonesia. Pertama, peserta didik bisa mendapatkan kosa kata baru yang sebelumnya tidak didengar. Kosa kata menjadi komponen penting untuk menambah perbendaharaan kata yang menunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, isu yang menjadi perhatian dalam topik debat adalah isu-isu yang kontekstual terkait persoalan-persoalan bangsa hari ini, mulai dari isu penegakkan hukum sampai perkembangan teknologi digital. Isu-isu ini bisa memperkaya wawasan peserta didik mengenai topik-topik mutakhir hari ini.

Ketiga, debat presiden, dalam beberapa kondisi, mengajarkan bahwa dalam mengajukan argumen atau sanggahan membutuhkan data pendukung. Hal ini sebagai bagian mendasar untuk bisa mengajukan klaim kebenaran. Sebagai contoh yang dipaparkan Ganjar dalam sesi debat ketiga:

“Mari kita bicara data yang benar, *global military sessions*, indeks kita, sumbernya *Bond International Centre For Conflict Studies*, turun semua skornya... Militer kita ini, dari *Law Institute Asia Power Indeks* turun, proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya *The Military Balance*”.

Keterangan yang diungkapkan Ganjar menjadi contoh bagaimana dalam rangka membangun argumen membutuhkan bukti yang mendukung. Hal ini sebagai pembelajaran penting bagaimana debat bukan berarti menyerang secara brutal dengan sinis tanpa menyertakan bukti atau data sebagai sumber rujukan.

Keempat, peserta didik dapat memahami bahwa di dalam debat, meski harus mempertahankan pendapatnya, terdapat nilai-nilai esensial yang harus menjadi kesepakatan. Pada umumnya, pemahaman debat atau pelatihan debat yang dilakukan adalah fokus bagaimana setiap pihak yang berdebat mempertahankan pendapatnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya debat menjadi bersifat monolitik. Gambangnya, pendidik biasanya meminta siswa untuk berargumen untuk mempertahankan posisinya atau menentang posisi kebijakan tertentu dari lawan. Namun, debat Capres dan Cawapres bisa menunjukkan bahwa meski masing-masing kandidat berupaya mempertahankan posisi dan gagasannya, senantiasa terdapat nilai-nilai esensial yang menjadi kesepakatan antar kandidat, misalnya keadilan atau kebebasan. Sebagai contoh, Anies Baswedan mengatakan pada debat pertama bahwa:

“...Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkaran *judicial* bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas anda menghadirkan rasa keadilan”.

Begitu juga dengan pernyataan dari Prabowo bahwa “Saya pendapat. Kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul...”. Begitu pula *closing statement* dari Ganjar pada debat pertama yang mengatakan, “...Saya berdiri bersama korban untuk keadilan...”. Dengan demikian, peserta didik harus memahami bahwa ada nilai-nilai esensi yang tetap dipegang sebagai acuan dalam membangun argumen.

Kelima, penilaian terkait debat tidak hanya berkaitan dengan sistematika berpikir dan kebenaran logika semata, namun terdapat aspek kesantunan yang perlu diperhatikan. Hal ini sebagai bagian penting dalam temuan penelitian ini. Temuan yang disajikan sebelumnya mengungkap bahwa poin pelanggaran kesantunan yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran maksim pujian, yakni melakukan usaha cacian kepada mitra tutur agar memaksimalkan pujian bagi diri sendiri. Wujud pernyataannya melalui pemberian nilai atau pendapat yang kurang baik terhadap kualitas mitra tutur. Salah satu ungkapan yang menjadi perhatian peneliti adalah strategi debat dengan cara melakukan *argumentum ad hominem*, yakni jenis argumen yang menggunakan sudut pandang prasangka atau perasaan yang tidak relevan untuk menyerang secara personal karakter orang lain dan bukannya membahas fakta atau klaim yang sesuai dengan tema debat.

Hal ini misalkan pernyataan Prabowo dalam debat pertama bahwa:

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu... Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur, soalnya waktu itu (kita) oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih”.

Pernyataan Prabowo tersebut mengindikasikan perubahan topik utama debat mengenai hukum dan demokrasi menjadi persoalan yang bersifat pribadi. Hal ini menjadikan topik debat bergeser dari isu utama pada persoalan pribadi. Anies juga melakukan hal serupa dalam sesi debat pertama ketika dengan mengatakan:

“Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah ke suara rakyat, semua akan kompromi dan praktik orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Karena itulah, penting sekali kita menjunjung tinggi etika, dan itu dilakukan siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika?!”

Pernyataan Anies di atas mengarah pada isu yang saat itu ramai diperbincangkan, yakni tentang keputusan MK tentang batasan umum Capres-Cawapres yang membuat Gibran, Putra Sulung Presiden Jokowi, yang belum genap 40 tahun bisa turut ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilpres 2024, khususnya menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKM) telah menyatakan bahwa Ketua MK yang memutus perkara, yakni Anwar Usman, yang juga adik Ipar Jokowi, bersalah karena melanggar etika hakim sekaligus mendapat ganjaran dicopot dari posisinya sebagai ketua MK.

Sesuai dengan pandangan Leech, Anies Baswedan menyimpang dari maksim pujian dengan memberikan nilai yang rendah terhadap kualitas Prabowo Subianto dengan melontarkan pernyataan yang menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Anies meyakini bahwa Prabowo adalah pemimpin yang buruk dan tidak boleh dipilih karena sedari awal proses pencalonannya bermasalah. Tidak memilih pemimpin yang melanggar etika, berarti menunjukkan upaya menyelamatkan proses demokrasi yang sehat bagi keberlanjutan Indonesia.

Masih banyak lagi bentuk-bentuk serangan personal sebagai bentuk ungkapan yang menjadikan pelanggaran terhadap maksim pujian. Poinnya, salah satu materi penting yang harus terintegrasi dalam pelajaran debat Bahasa Indonesia adalah menghindari ungkapan-ungkapan yang mengindikasikan pelanggaran kesantunan berbahasa, khususnya menyangkut serangan personal.

### *Diskusikan*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski bentuk-bentuk pelanggaran maksim bervariasi antar masing-masing kandidat, semua bentuk pelanggaran maksim Leech, yang terdiri dari enam maksim, dapat dijumpai dalam proses lima kali debat. Pelanggaran terhadap maksim kesantunan Leech juga mengindikasikan terjadi gejala berbicara yang tidak santun berdasarkan pemaparan dari Pranowo (2021), diantaranya menyampaikan kritik secara langsung atau lugas dengan kata-kata yang kasar, sengaja ingin memojokkan mitra tutur, serta menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.

Temuan ini menguatkan sejumlah penelitian terdahulu tentang kerawanan pelanggaran kesantunan dalam debat politik dalam berbagai konteks, misalkan acara *talk show* maupun debat presiden. Sebagaimana penelitian Arum et al. (2020) dengan subjek acara debat politik dalam acara *talkshow* Mata Najwa di TransTV menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan berbahasa meliputi enam maksim secara keseluruhan. Begitu juga dengan penelitian Septiana (2023) yang menemukan terjadi keseluruhan bentuk pelanggaran maksim dalam debat Pilpres 2019.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk pelanggaran paling tinggi adalah *Approbation Maxim* (Maksim Pujian) dengan jumlah 41 kali atau setara dengan 53,2% dari keseluruhan ungkapan pelanggaran kesantunan, selanjutnya pelanggaran *Agreement Maxim* (Maksim Kesepakatan) sebanyak 15 kali atau setara dengan 19,5%, dan *Modesty Maxim* (Kerendahan Hati) sebanyak 9 atau setara dengan 11,7%. Tiga jenis pelanggaran lainnya juga terjadi meskipun frekuensinya tidak sebanyak tiga bentuk pelanggaran tersebut, yakni pelanggaran *Generosity Maxim* (Kedermawanan) sebanyak 7 kali,



*Sympathy Maxim* (Maksim Simpati) sebanyak 4 kali, dan Pelanggaran *Tact Maxim* (Maksim Kebijaksanaan) sebanyak 1 kali. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Septiana (2023) yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran tertinggi pada debat Pilpres 2019 adalah Maksim Kebijaksanaan, sementara maksim pujian berada di posisi kedua. Perbedaan temuan tersebut beralasan karena konteks debat yang menjadi objek penelitian berbeda.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah catatan terkait dengan Debat Capres-Cawapres sebagai bahan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat Sekolah Menengah. Debat Capres dan Cawapres bisa menjadi media untuk menambah kosa kata, pengantar memahami topik-topik kontekstual, pentingnya berdebat berdasarkan data, memegang teguh nilai-nilai esensial tertentu dalam debat, dan menghindari pelanggaran kesantunan, terutama dalam bentuk serangan dalam bentuk personal.

Urgensi tentang debat sebagai sarana yang efektif untuk menumbuhkan pembelajaran kewarganegaraan selaras dengan penelitian Abernathy & Forestal (2021). Temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa perlunya mengembangkan pembelajaran debat yang bersifat pluralistik. Artinya, siswa harus dikenalkan bahwa debat tidak selalu membentuk dua poros yang mati-matian berusaha mempertahankan pendapatnya masing-masing. Terdapat nilai-nilai universal yang menjadi panduan dalam debat, semisal prinsip keadilan. Hal ini akan menjadikan debat, berdasarkan bimbingan tenaga pengajar, sebagai sarana penumbuhan pendidikan kewarganegaraan sekaligus. Dalam konteks tersebut, maka keterangan dari Pranowo (2021) menemukan relevansinya bahwa pengajaran debat di Indonesia sudah seharusnya tidak hanya mengajarkan proses berpikir sistematis dan kritis, namun memasukkan aspek-aspek kesantunan dalam berbahasa.

## Simpulan

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa semua jenis pelanggaran maksim dapat ditemukan dalam lima kali perhelatan debat Capres dan Cawapres 2024, yakni pelanggaran *tact maxim* (maksim kebijaksanaan), pelanggaran *generosity maxim* (kedermawanan), *approbation maxim* (maksim pujian), *modesty maxim* (kerendahan hati), *agreement maxim* (maksim kesepakatan), *sympathy maxim* (maksim simpati). Adapun bentuk pelanggaran paling dominan berdasarkan jumlah ungkapan dari semua kandidat adalah pelanggaran terhadap maksim pujian, dengan angka 53,2% dari keseluruhan ungkapan pelanggaran kesantunan. Hasil penelitian ini berikutnya menemukan bahwa terdapat relevansi untuk menjadikan tayangan debat Capres-Cawapres sebagai media pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini karena bisa menambahkan kosa kata, pengantar memahami topik-topik kontekstual, urgensi berdebat melalui data. Selain itu, pembelajaran debat dalam Bahasa Indonesia berdasarkan catatan temuan harus mengintegrasikan nilai-nilai universal sebagai kesepakatan atau pegangan dalam berdebat, seperti keadilan dan kesetaraan. Selain itu, perlu adanya edukasi mengenai bagaimana peserta didik untuk tidak melakukan debat dengan cara melanggar kesantunan, terutama dalam bentuk serangan pribadi yang mengakibatkan topik utama debat menjadi tersisihkan. Dengan kata lain, perlu untuk mensinergikan prinsip-prinsip kesantunan dalam muatan berbahasa Indonesia dalam pelajaran debat, disamping muatan berpikir sistematis dan logis semata.

Penelitian ini lebih terfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran dalam debat Capres-Cawapres serta catatan terhadap hal tersebut terkait relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah tidak membuat modul pembelajaran yang secara praktis dan sistematis bagaimana menjadikan debat sebagai media pembelajaran. Hanya terbatas pada relevansinya untuk menjadikan debat sebagai media pembelajaran. Penelitian selanjutnya bisa melakukan *Research and Development* (RnD) dalam rangka menyusun bahan ajar terkait upaya mengintegrasikan aspek kesantunan dalam Pelajaran bahasa Indonesia melalui media debat Capres dan Cawapres.

## Daftar Rujukan

- Abernathy, Claire, and Jennifer Forestal. "The use of debates in political science courses." *Journal of Political Science Education* 17.3 (2021): 343-355.
- Arum, Imam Mas, and Riyadi Santosa. "Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Kontroversi Ancaman People Power Pascapilpres." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11.2 (2020): 141-152.

- Batubara, Muhammad Hasyimsyah, Cut Dara Ilfa Rahila, and Hamna Fitri. "An analysis of politeness strategies used by Donald Trump and Hillary Clinton presidential debate 2016." *Journal of Linguistics, Literature, and Language Teaching (JLLLT)* 1.2 (2022): 51-58.
- Doohee, Adawiya. "The Language of Politeness in the US Presidential Debates in 2012." *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 6.12 (2023): 145-152.
- Fahad, Ali Afrawee, and Hussain Hameed Mayuuf. "A Critical Pragmatic Study of Nastiness in Trump's Talk during the US 2020 Presidential Debates." *Journal of Positive School Psychology* (2022): 3900-3906.
- Hameleers, Michael. "Empowering the people's truth through social media?(De) legitimizing truth claims of populist politicians and citizens." *Politics and Governance* 10.1 (2022): 210-219.
- Hamza, M., and N. Nordin. "Pragmatic deviation of politeness principle in Trump's political speeches." *Research Journal in Advanced Humanities* 4.4 (2023): 99-120.
- Katadata.com. "Apa Alasan Warga Menonton Debat Capres-Cawapres? Ini Hasil Surveinya." *Databoks Kata Data*, 2023: <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/771ff96a0fbb5ad/apa-alasan-warga-menonton-debat-capres-cawapres-ini-hasil-surveinya>
- Kusworo, Andy, Rustono Rustono, and Hari Bakti Mardikantoro. "Violation of the Politeness Principle in the Presidential and Vice-Presidential Debates 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections." *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 11.1 (2022): 81-87.
- Leech, Geoffrey. *Prinsip-prinsip pragmatic*. Depok: UI Press, 2015.
- Leech, Geoffrey. *The Pragmatics of Politeness*. Oxford: Oxford University Press. 2014.
- Leech, Geoffrey. *Language in literature: Style and foregrounding*. Routledge, 2013.
- Litan, Robert E., Kimberly Willingham, and Beth Schueler. "How Competitive Debate Can Improve Public Education." *Brookings Institution* (2023).
- Pangestika, Widya, Agustina Agustina, and Ngusman Abdul Manaf. "Violation Principles by Politicians in the Discourse of Jakarta Election 2017 at Online Portal News." *International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Pranowo. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Santosa, Riyadi. "Metodologi penelitian linguistik/pragmatik." *Prasasti: Conference Series*. 2016: 21-32.
- Septiana, Mikha Dormauli. "Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019." *LITERATUR: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran* 3.2 (2023): 92-115.
- Sihite, Meida Rabia, Sofia Idawati Lubis, and Devi Meitina Astuty Silalahi. "Politeness strategies used by the presidential candidates of Indonesia in the 2019 presidential debates." *EXCELLENCE: Journal of English and English Education* 1.2 (2021): 9-17.
- Wales, Katie. *A dictionary of stylistics*. London: Routledge, 2014.